

Pengaruh Fungsi Pengayom Pada Induk Koperasi Syariah BMT Terhadap Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah (Studi kasus pada INKOPSYAH BMT)

The effect of Service Function (APEX) on the Central of Sharia Cooperation on the level of Primary Cooperative Health

Muhammad Irwan^{*1}, Musa Hubeis², dan Suryahadi³

¹Program Magister Pengembangan IKM, Sekolah Pascasarjana IPB

²Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB
Jl. Kamper Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

³Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan IPB
Jl. Agatis Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

ABSTRAK

Induk Koperasi Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (Inkopsyah BMT) yang berperan sebagai APEX (Pengayom) BMT mempunyai fungsi utama yakni sebagai lembaga resmi dalam menangani sistem likuiditas para anggotanya (BMT) dan mempermudah segala urusan transaksi antar lembaga BMT maupun antar anggota BMT yang berlainan, serta membantu setiap anggota agar memiliki tingkat kepastian dan kenyamanan bagi setiap penggunaannya. Fungsi tersebut sebagai berikut: (1) Melakukan fungsi penghimpunan simpanan wajib minimum (SWM) atau *pooling of funds* dan dana padanan (*committed facility line*), (2) Melakukan fungsi dukungan pendanaan (*financial assistance*), (3) Melakukan fungsi dukungan teknis (*technical assistance*), (4) Melakukan fungsi pelaporan (reporting) terhadap koperasi primer syariahnya, serta (5) Melakukan fungsi pengukuran dan pemeringkatan cepat (*quick rating*). Berdasarkan fungsi tersebut peran Inkopsyah BMT sebagai APEX BMT sangat diperlukan, karena keberhasilan anggota primernya menjadi koperasi yang berkualitas secara tidak langsung memerlukan peran Inkopsyah BMT sebagai pembimbing dan pengayom. Metode penelitian melalui (1) Angket, (2) Interview dan (3) Observasi, serta (4) Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengayom Inkopsyah BMT belum memberikan pengaruh pada tingkat kesehatan anggota primer syariah, perlu dukungan terhadap sistem jaringan nasional yang difasilitasi oleh pemerintah berupa dibangunnya infrastruktur sistem informasi atas penilaian Kesehatan koperasi primer, sehingga mempercepat proses *update* informasi dari Inkopsyah BMT menjadi lebih mampu dalam melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap para anggotanya.

Kata kunci: BMT, Pengayom, Tingkat Kesehatan, Koperasi Primer Syariah

ABSTRACT

Inkopsyah BMT has main function, namely as an official institution in handling the liquidity system of its members (BMT) and facilitating all transactions between BMT institutions and between different BMT members, as well as helping each member to have a level of certainty and comfort for each its users. These functions can be described as follows: (1) Performing the function of collecting the minimum mandatory deposit (SWM) (*pooling of funds*) and equivalent funds (*committed facility line*), (2) Performing the function of funding support (*financial assistance*), (3) Performing technical support functions (*technical assistance*), (4) Performing reporting functions (reporting) on primary sharia cooperatives, and (5) Performing quick rating and measurement functions. Based on this function, the role of Inkopsyah BMT as APEX BMT is very necessary because the success of its primary members becoming a quality cooperative indirectly requires the role of Inkopsyah BMT as a guide and protector. Based on analysis test using the normality test and the significance and linearity test of the sample taken

*) Korespondensi:

Diamond Residence Jl.Kirai 1 Blok I. 26 Rt.001/005 Pisangan, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15446;
email: irwanharjo@gmail.com

with the methods used in the study through (1) Questionnaire, (2) Interview and (3) Observation, and (4) Documentation. The results of the study shows that the protecting the parent BMT Syariah Cooperative has not had an influence on the health level of primary members of the sharia. There is a need for support for a national network system facilitated by the government in the form of building an information system infrastructure for primary cooperative health assessments so that it is hoped that the process of updating information will accelerate and the BMT Inkopsyah will be more capable of supervising and controlling its members.

Key words: BMT, Protection, Health Level, Sharia Primary Cooperative

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia, yakni 227.226.405 jiwa atau sama dengan 87,2% dari total populasi 260.580.739 jiwa (CIA, 2017). Ditinjau dari aspek filosofis, keberadaan dan peran lembaga keuangan yang berprinsip syariah sangat strategis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi umat Islam dalam menghindari riba dan mendukung tercapainya kemandirian ekonomi nasional (Kemenperin, 2015).

Lembaga keuangan koperasi menjadi salah satu *leading* sektor yang cukup berperan, khususnya di bidang mikro syariah dalam membangun perekonomian di Indonesia. Tahun 2020 jumlah koperasi aktif di Indonesia mengalami peningkatan menjadi 127.124 atau meningkat 4.076 dari tahun 2019 yang sebelumnya berjumlah 123.048 koperasi (data BPS tahun 2020). Berdasarkan data dukung rakornas Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) tahun 2019 jumlah koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) sekunder periode tahun 2016-2018, terdapat tiga koperasi sekunder di tingkat nasional, 20 koperasi sekunder di tingkat provinsi dan enam koperasi sekunder di tingkat kabupaten/kota di Indonesia.

Induk Koperasi Syariah Baitul Maal wa Tamwil (Inkopsyah BMT) adalah salah satu koperasi sekunder tingkat nasional yang didirikan oleh gabungan primer koperasi dengan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Koperasi ini lahir pada tahun 1998 sebagai mitra strategis dari para lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang berwujud BMT dan sebagai fasilitator perubahan perekonomian rumah tangga rakyat khususnya untuk umat Islam menjadi lebih baik dan sejahtera. Sampai dengan tahun 2019, anggota aktif dari Inkopsyah BMT berjumlah 354 anggota yang tersebar di 27 provinsi.

Misi didirikannya Inkopsyah BMT adalah: (1) Membangun sistem organisasi yang tangguh dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta

memiliki tata kelola usaha yang baik; (2) Membangun kerjasama antar anggota melalui jaringan yang terpadu dan kokoh; (3) Memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anggota melalui akses pemodal dan pelayanan pembiayaan yang efektif, aman dan memberikan manfaat bersama. Visi yang dicanangkan adalah “menjadi lembaga sehat, mandiri dan bermartabat”.

Inkopsyah BMT yang berperan sebagai koperasi sekunder, harus memberikan motivasi agar anggotanya menjadi lembaga yang kuat, kredibel dan mampu memberikan pelayanan terbaik, sehingga dapat bersaing secara sehat. Koperasi syariah harus bersatu membentuk dan membangun kekuatan bersama serta berkomitmen menjaga dan meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik, melalui jaringan kerjasama usaha antar koperasi syariah (JKUK). Melalui JKUK, Inkopsyah BMT menjadi pengayom (APEX) bagi para anggotanya agar lebih solid dan terarah, sehingga diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Terminologi APEX dalam bahasa Yunani berarti “pengayom”, yaitu memberikan amanat kepada lembaga yang ditunjuk sebagai APEX menjadi pengayom bagi anggotanya. Pengayom KSPPS merupakan *self regulated organization* atau organisasi yang membuat aturan sendiri dan mengikat bagi setiap anggotanya. Organisasi ini bukan sekedar asosiasi ataupun perhimpunan sebagai *pressure group* untuk memperjuangkan nasib KSPPS, tetapi untuk membangun komitmen agar KSPPS dapat maju bersama dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan penyuluhan, pendidikan maupun pengembangan berupa penelitian terkait permasalahan koperasi, termasuk di dalamnya melakukan pengawasan dan perlindungan, memberikan fasilitas permodalan, serta pengembangan kerja sama. Memberdayakan koperasi sekunder sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah

dapat berfungsi untuk melihat dan memantau operasional koperasi syariah yang ada di seluruh Indonesia.

Sebagai lembaga keuangan, pengelolaan KSPPS dituntut harus profesional. Selain wajib memiliki visi dan misi, koperasi wajib memiliki standar operasional prosedur (SOP) dan standar operasional manajemen (SOM), serta sumber daya manusia (SDM) yang bermutu. Semua ini bertujuan untuk demi terwujudnya pengelolaan koperasi yang sehat, pelayanan yang prima, menjaga dan meningkatkan citra, kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah kepada anggota dan masyarakat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Selain itu terjaminnya aset, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

Melalui peraturan deputy bidang pengawasan Kemenkop UKM Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) dan unit simpan pinjam pembiayaan syariah (USPPS), ruang lingkup penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS dilakukan terhadap aspek: (1) permodalan, (2) mutu aktiva produktif, (3) manajemen, (4) efisiensi, (5) likuiditas, (6) kemandirian dan pertumbuhan, (7) jati diri koperasi serta (8) prinsip syariah. KSPPS dan USPPS yang masih aktif menjalankan kegiatan usahanya, harus dinilai kesehatannya berdasarkan peraturan tersebut secara periodik atau minimal satu tahun sekali demi menjaga akses kerja sama dengan pihak ketiga dan *stakeholder* lainnya.

Dalam mewujudkan penilaian kesehatan tersebut, Inkopsyah BMT yang berperan sebagai APEX BMT mempunyai fungsi utama, yakni sebagai lembaga resmi dalam menangani sistem likuiditas para anggotanya (BMT) dan mempermudah segala urusan transaksi antar lembaga BMT maupun antar anggota BMT yang berlainan, serta membantu setiap anggota agar memiliki tingkat kepastian dan kenyamanan bagi setiap penggunaannya. Fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Melakukan fungsi penghimpunan simpanan wajib minimum (SWM) (*pooling of funds*) dan dana padanan (*committed facility line*); (2) Melakukan fungsi dukungan pendanaan (*financial assistance*); (3) Melakukan fungsi

dukungan teknis (*technical assistance*); (4) Melakukan fungsi pelaporan (*reporting*) terhadap koperasi primer syariahnya; serta (5) Melakukan fungsi pengukuran dan pemeringkatan cepat (*quick rating*) (Kemenkop UKM, 2017). Berdasarkan fungsi tersebut peran Inkopsyah BMT sebagai APEX BMT sangat diperlukan karena keberhasilan anggota primernya menjadi koperasi bermutu yang secara tidak langsung memerlukan peran Inkopsyah BMT sebagai pembimbing dan pengayom.

METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Direktur Utama Inkopsyah BMT dengan teknik wawancara langsung dan pengamatan (*observasi*) langsung di kantor.

Sugiyono (2017) menjelaskan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen Inkopsyah BMT dan koperasi primer, dokumen-dokumen Kementerian Koperasi dan UKM, perusahaan serta literatur yang relevan dengan peneliti berupa buku-buku, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi elektronik (*internet*). Data yang telah tersedia di Inkopsyah dianalisis dan interpretasi sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu memperoleh teori-teori yang mendukung penelitian ini dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah literatur-literatur berupa buku, makalah, dan jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian.

b. Dokumentasi

Hal ini langkah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2001). Populasi dalam penelitian ini adalah

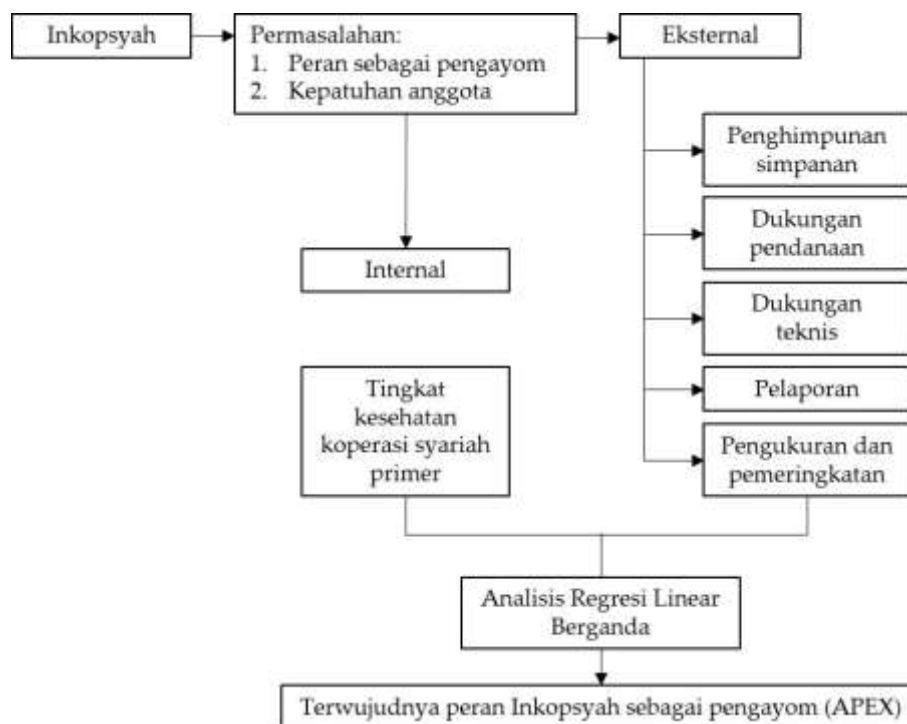
seluruh anggota koperasi primer dari Inkopsyah BMT. Dari data Laporan Pertanggungjawaban Usaha Inkopsyah BMT Tahun Buku 2019, diperoleh informasi bahwa total seluruh anggota adalah 354 KSPPS atau Koperasi yang memiliki USPPS.

Sampel seluruh anggota adalah koperasi syariah primer yang termasuk dalam kriteria koperasi sesuai peraturan terbaru dari Kementerian Koperasi dan UKM RI No. 10/Per/M.UMKM/IX/2015 tentang kelembagaan dan sebagaimana yang telah diubah menjadi No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian masih berjalan, dan Peraturan No.11/Per/M.KUMKM/IX/2017 anggota yang sudah melampaui tiga tahun berturut-turut atau mencapai aset paling sedikit Rp5 milyar dapat berubah menjadi KSPPS, sehingga dapat dikategorikan koperasi yang memiliki secara kelembagaan, perubahan anggaran dasar, Nomor Induk Koperasi (NIK) dan surat ijin operasional khususnya Surat Ijin Simpan Pinjam (SIUPSP), Dewan Pengawas (bersertifikat DSN MUI), serta memiliki unit kerja sosial masih berlaku efektif; Kriteria selanjutnya adalah Koperasi yang berada di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya yang merupakan wilayah dengan sebaran anggota tertinggi.

Peubah yang digunakan dalam penelitian ini dibagi atas:

- Peubah terikat (*dependent*), yaitu peubah yang nilainya dipengaruhi oleh peubah bebas. Dalam penelitian yang menjadi peubah terikat adalah peubah yang nilainya dipengaruhi oleh peubah bebas, yaitu tingkat kesehatan anggota primer.
- Peubah bebas (*independent*) meliputi lima peubah berikut; fungsi penghimpunan simpanan wajib minimum dan dana padanan (X1), fungsi dukungan pendanaan (X2), fungsi dukungan teknis (X3), fungsi pelaporan (X4), fungsi pengukuran dan pemeringkatan cepat (X5). Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner dengan 34 butir pertanyaan, dimana 6 pertanyaan inti. Kuesioner yang ada didesain berdasarkan model skala *Likert* yang merujuk pada lima alternatif jawaban, berikut: *Sangat setuju* = 5, *Setuju* = 4, *Ragu-ragu* = 3, *Kurang setuju* = 2, *Tidak setuju* = 1.

Tahap berikutnya dilakukan pengujian instrumen yang meliputi uji validitas dan reliabilitas. Untuk mempermudah dalam perhitungan uji korelasi dan regresi non parametris, digunakan program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) dengan menggunakan korelasi Spearman dan Metode Kuadrat Terkecil (*2-Stage Least Squares*). Teknik analisis data untuk pengujian hipotesis adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.



Gambar 1. Kerangka penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data untuk ilustrasi ini diambil dari Induk Koperasi Syariah BMT tentang nilai kesehatan KSPPS dan peran inkopsyah BMT pada masing-masing fungsi dari sembilan anggota koperasi primer syariah sebagai sampel. Data diasumsikan tidak berdistribusi normal pada $\alpha = 0.05$. Variabel yang akan dicari korelasinya, didefinisikan sebagai berikut:

Y Y: Nilai Kesehatan KSPPS

X1: Inkopsyah BMT sebagai *fungsi penghimpun simpanan dan dana padanan wajib*

X2: Inkopsyah BMT sebagai *fungsi dukungan pendanaan*

X3: Inkopsyah BMT sebagai *fungsi dukungan teknis*

X4: Inkopsyah BMT sebagai *fungsi pelaporan*

X5: Inkopsyah BMT sebagai *fungsi pengukuran dan pemeringkatan cepat*

X6: Inkopsyah BMT sebagai *fungsi melakukan penilaian tingkat kesehatan anggota primer*

Hasil uji hipotesis sebagai berikut (Tabel 1):

- Pengaruh fungsi penghimpun simpanan dan dana padanan wajib terhadap Tingkat Kesehatan KSPPS **tidak berarti dan tidak linear** (tidak diperoleh angka *deviation of linearity*) sehingga untuk variabel ini tidak dapat dilakukan analisis regresi.
- Pengaruh fungsi dukungan pendanaan, fungsi dukungan teknis, fungsi pelaporan, fungsi pengukuran dan pemeringkatan cepat, serta fungsi melakukan penilaian atas kesehatan anggota terhadap Tingkat kesehatan KSPPS **tidak berarti dan linear**, sehingga masih dapat dilakukan analisis regresi.

Hipotesis Pertama

Dari hasil analisis laporan keuangan didapatkan fungsi dukungan pendanaan Inkopsyah BMT belum memiliki pengaruh

signifikan terhadap tingkat kesehatan KSPPS dikarenakan modal kerja yang terbatas. Hal ini berkaitan dengan laba yang semakin menurun, sehingga berpengaruh terhadap kinerja.

Hipotesis Kedua

Dari hasil analisis laporan keuangan yang dilakukan bahwa fungsi dukungan pendanaan Inkopsyah BMT belum memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan KSPPS dikarenakan modal kerja yang terbatas. Hal ini berkaitan dengan laba yang semakin menurun, sehingga berpengaruh terhadap kinerja.

Hipotesis Ketiga

Dari hasil analisis yang dilakukan, didapatkan fungsi dukungan teknis Inkopsyah BMT belum memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan KSPPS, dikarenakan belum terukurnya hasil pelatihan yang diberikan sebagai manfaat bagi KSPPS.

Hipotesis Keempat

Inkopsyah BMT sendiri masih melakukan koneksi secara manual. Dari hasil analisis tersebut didapatkan fungsi pelaporan Inkopsyah BMT belum memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan KSPPS, dikarenakan secara sistem jaringan belum didukung maksimal. Untuk itu anggota Inkopsyah BMT yang tersebar di seluruh Indonesia harus memiliki jaringan terkoneksi secara digital.

Hipotesis Kelima

Pengawasan dan pengendalian terhadap Koperasi harus dilakukan secara *visit (fisik) on the spot*. Dengan adanya kondisi fisik anggota yang tersebar di seluruh Indonesia telah membuat Inkopsyah BMT harus memperhitungkan pendanaan secara maksimal termasuk dengan belum dilakukan dukungan sistem terkoneksi dengan jaringan.

Tabel 1. Hasil uji hipotesis

Hipotesis	Z _{hitung}	Z _{tabel}	Kesimpulan
Terdapat pengaruh signifikan fungsi dukungan pendanaan Inkopsyah BMT terhadap tingkat kesehatan KSPPS	-0,3535	1,96	Hipotesis tidak diterima
Terdapat pengaruh signifikan fungsi dukungan teknis Inkopsyah BMT terhadap tingkat kesehatan KSPPS	-0,1414	1,96	Hipotesis tidak diterima
Terdapat pengaruh signifikan fungsi pelaporan Inkopsyah BMT terhadap tingkat kesehatan KSPPS	-0,3535	1,96	Hipotesis tidak diterima
Terdapat pengaruh signifikan fungsi pengukuran dan pemeringkatan cepat Inkopsyah BMT terhadap tingkat kesehatan KSPPS	0,5487	1,96	Hipotesis tidak diterima
Terdapat pengaruh signifikan fungsi pengayom Inkopsyah BMT terhadap tingkat kesehatan KSPPS	1,442	1,96	Hipotesis tidak diterima

Hipotesis Keenam

Dari kelima hipotesis, masing-masing fungsi belum terkoordinasi secara maksimal, karena hipotesis ditolak. Sumber daya manusia yang ada kurang dimaksimalkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara menyeluruh. Dalam hal ini sistem informasi (SI) yang belum terkoneksi dengan jaringan juga menjadi salah satu hambatan cukup berarti. Ditambah dengan kondisi keuangan Inkopsyah BMT yang semakin lama semakin menurun, maka hal ini membuat kinerja semakin tidak efektif. Dengan demikian, fungsi pengayom Inkopsyah BMT belum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan anggota primer syariah, karena masing-masing fungsi tersebut belum dapat terkoordinasi secara maksimal.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan fungsi pengayom Induk Koperasi Syariah BMT belum memberikan pengaruh signifikan pada tingkat kesehatan anggota primer syariah sesuai dengan fungsi Inkopsyah BMT sebagai APEX. Hal ini secara keseluruhan dijelaskan sebagai berikut:

Kendala teknis

Sistem jaringan yang terkoneksi kepada jaringan *internet* masih baru sebatas jaringan *intranet* (di dalam) KSPPS itu sendiri, atau belum adanya jaringan menyeluruh yang mencakup WAN, sehingga semakin menghambat kinerja pengawasan dan pengendalian.

Kendala keuangan

Kondisi keuangan Inkopsyah BMT yang semakin menurun membuat Koperasi harus mempertimbangkan secara matang rencana pengeluaran, seperti pengawasan langsung kepada anggota primer yang ada di seluruh Indonesia.

Manajemen

Pelatihan yang sudah dilakukan Inkopsyah BMT secara berkala masih belum memaksimalkan peran yang harus dilakukan Inkopsyah BMT sebagai pengayom utama, karena belum maksimalnya pengawasan langsung yang dilakukan Inkopsyah BMT. hal tersebut berpengaruh terhadap proses pemenuhan kebutuhan informasi atas masalah yang terjadi pada setiap anggota yang nantinya dapat mempercepat proses pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, P. 2014. Analisis Kinerja Keuangan untuk Mengukur Kesehatan Keuangan Koperasi KSU BMT Arafah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dosen Tetap STIE AMA Salatiga, Jawa Tengah.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia. 2019. Bappenas. Jakarta (ID)
- Badan Pusat Statistik. Jumlah Koperasi Aktif menurut Provinsi. <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2019/07/22/1643/jumlah-koperasi-aktif-menurut-provinsi-2006-2017.html>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2020 pukul 10:15 WIB 2019.
- (CIA) Central Intelligence Agency. 2017. The World Factbook. Diakses 11 Oktober 2020.
- Eidrias, T.D., D.F. Azizah. 2016. Analisa Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016(Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Bahagia Kota Kediri). Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang
- Hasanah, A.M. 2018. Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di KPRI Mu'awanah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Skripsi Jurusan EKonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto--lapangan-usaha.html>. 16 November 2019. Badan Pusat Statistik. http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1566783293_Data%20Koperasi%20Tahun%202018.pdf. 16 November 2019. Kementerian Koperasi dan UKM
- [Kemenkop UKM] Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. 2016. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM No 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS
- [Kemenperin] Kementerian Perindustrian. 2015. *Menperin: Lembaga Pembiayaan dapat Meningkatkan Daya Saing Industri*. Siaran Pers 5 Mei 2015. Tersedia pada <http://www.kemenperin.go.id/artikel/11881/Memperin-Lembaga-Pembiayaan-Dapat-Meningkatkan-Daya-Saing-Industri>. Diunduh pada 2020 11 Oktober 2020.

- Lubis, M., Z. Mubarak. 2019. Penilaian Kesehatan BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Sumatera Barat
- Mardiana. 2013. Analisis Tingkat Kesehatan Pelaporan Keuangan pada Koperasi Unit Desa Sejahtera Kecamatan Babat Toman. Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu.
- Mustakim. 2014. Analisa Penilaian Kesehatan Koperasi pada KPRI Jujur Pemkab Bintan di Tanjungpinang. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.
- Putri, K.D. 2017. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam Wisuda Guna Raharja, Lombok). Program Studi Manajemen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sanatadarma. Yogyakarta
- Riwajanti, N.I. 2017 Bagaimana Meningkatkan keberlanjutan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Politeknik Negeri Malang. Malang, Jawa Timur.
- Rustendi, T. 2015. Pengaruh Tingkat Penghimpunan dan Penyaluran Dana Terhadap Rentabilitas (Studi pada Bank Perkreditan Rakyat Siliwangi Tasikmalaya). Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi. Jurnal Magister Manajemen ISSN:2085-7055 Vol 8 No 1 Maret 2015.
- Sudarma, I.W. 2013 Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Gianyar. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali.
- Sukmana, A.A., S. Mulyati. 2017. Penilaian Kesehatan KJKS BMT Binamas. KAP Heliantono dan Program Studi Akuntansi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Depok, Jawa Barat.
- Syofyan, A., Ervina. 2014. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil dengan Metode CAMEL. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.